ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Nama : **Shela Dewi Payona**
NIM : **22 2011 231**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : **Shela Dewi Payona**
NIM : **22 2011 231**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shela Dewi Payona

NIM : 22 2011 231

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 21 April 2015

Penulis,

Shela Dewi Payona

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.**
Nama	**: Shela Dewi Payona**
Nim	**: 22 2011 231**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 5 Maret 2015

Pembimbing,

H.M.Basyaruddin. R, S.E.,M.Si,Ak
NIDN/NBM: 003055605/753416

Mengetahui,
Dekan
u.b. Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- "Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan."
- *"Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you."*

(Shela Dewi Payona)

Terucap syukur pada Mu Allah S.W.T

Ku persembahkan untuk :

- Papa dan Mamaku Tercinta
- Ayuk dan adik-adikku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan" untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai gelar sarjana S1.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Lukman Ratu dan Ibunda tercinta Syafnida. yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak H.M.Basyaruddin. R. S.E..M.Si.Ak sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E,Ak.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan. staf dan karyawan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daearah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Papa dan Mamaku (Lukman Ratu dan Syafnida) terimakasih atas segala cinta dan kasih sayangnya, doa yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku dan terimakasih telah menjadi penghilang kesedihanku, penyemangatku dan menjadi guru terbaikku.
7. Kepada ayuk dan adik-adikku (Sherly Wahyu Lestari A.Md, Shintia Delvina Lajuda dan Lucky Lokita Filiang). Terima kasih karena telah memberikan dorongan semangat, motivasi dan do'a yang tulus disetiap perjuanganku.
8. Sahabat-sahabatku (Dia Rachma Yanti, Febilia Yolanda, Indah Wahyuni, Isma Pibriani) terimakasih atas dukungan, suka duka dan kebersamaan 3,5 tahun ini.
9. Orang-orang terbaik yang aku miliki (Brenon Maxim, Riana Oktarina, Tari Herman) yang selalu memotivasi dan menyemangatiku, terimakasih telah menampung air mataku, tawaku, dan segalanya.

10. Seluruh teman-teman CA.11.2 terimakasih atas kebersamaannya, semoga kesuksesan selalu menyertai kita.
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skipsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 21 April 2015

Penulis,

Shela Dewi Payona

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER..... i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO..... v

HALAMAN PRAKATA..... vi

HALAMAN DAFTAR ISI..... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL..... xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... xiv

ABSTRAK..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 7

A. Penelitian Sebelumnya..... 7

B. Landasan Teori..... 10

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 10

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 10

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 11

2. Retribusi Daerah..... 11

a. Pengertian Retribusi Daerah 11

b. Objek dan Subjek Retribusi Daerah..... 13

c. Jenis-jenis Retribusi Daerah..... 14

d. Ciri-ciri Retribusi Daerah..... 25

e. Prinsip dan Sasaran Tarif Penetapan Retribusi Daerah..... 25

f. Cara Penetapan Tarif Retribusi Daerah..... 26

g. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah..... 27

h. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah..... 28

BAB III METODE PENELITIAN..... 30

A. Jenis Penelitian..... 30

B. Lokasi Penelitian..... 31

C. Operasionalisasi Variabel..... 31

D. Data yang diperlukan..... 32

E. Metode Pengumpulan Data..... 32

F. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35

A. Hasil Penelitian..... 35

B. Pembahasan..... 62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 80

A. Simpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jenis-jenis retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mencapai target tahun 2009-2013..... 4

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya..... 10

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel..... 31

Tabel IV.1 Data Personalia Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan..... 58

Tabel IV.2 Jumlah Pengunjung Taman Wisata Punti Kayu Tahun 2011-2013..... 63

Tabel IV.3 Jumlah Kendaraan Umum Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 (dalam unit) 65

Tabel IV.4 Data Inventaris Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014..... 67

Tabel IV.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2014..... 69

Tabel IV.6 Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor dan Jenis-jenis Alat Uji Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika..... 70

Tabel IV.7 Daftar nama Petugas Operasional di Lapangan pada Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan Kominfo dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014..... 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi..... 61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Selesai Penelitian

Lampiran 2 : Jadwal Penelitian

Lampiran 3 : *Fotocopy* Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)

Lampiran 4 : *Fotocopy* Sertifikat TOEFL

Lampiran 5 : Biodata Penulis

Lampiran 6 : Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 7 : Lembar Pengesahan Setelah Skripsi

ABSTRAK

Shela Dewi Payona/222011231/2015/Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan/ Akuntansi Sektor Publik.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif komparatif yaitu menganalisis bentuk uraian yang ada untuk mendapatkan metode penetapan target retribusi menurut teori dan fakta dan metode pengawasan target retribusi menurut teori dan fakta yang dilakukan atau dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Indikator dari faktor penyebab tidak tercapinya target retribusi daerah ada 3, yaitu (1) target penerimaan yang realistis (2) tingkat kebocoran (3) Kualitas Pelayanan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab tidak tercapinya target retribusi daerah yaitu (1) masih belum realistis dalam penentuan target retribusi (2) masih adanya tingkat kebocoran dalam pemungutan retribusi (3) masih kurang maksimalnya kualitas pelayanan yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam pemungutan retribusi.

Kata kunci : Faktor penyebab tidak Tercapainya Target Retribusi

ABSTRACT

Shela Dewi Payona / 222011231/2015 / The Analysis of Unreacheable Regional Retribution Factors in Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) South Sumatera Province/Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this research is what factors are causing not achieving the target of retribution in Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) South Sumatera Province. The goal is to determine the factors that lead to failure to achieve the target of retribution in Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) South Sumatera Province. This research is a descriptive study. The variables used are the causes of not achieving the target of retribution. The data used is primary data with data collection using interviews and documentation. Analysis of the data used is qualitative comparative analysis is to analyze the existing narrative form to get levy target setting method according to the theories and facts and methods of surveillance targets levy according to the theory and the facts made or levied by the Financial Management Board and the Regional Asset South Sumatra Province. Indicator of the factors causing the target of retribution tercapinya not exist 3, namely (1) a realistic revenue target (2) the level of leakage (3) Quality of Service. Results of research and discussion shows that the causes are not the target of retribution tercapinya namely (1) is still realistic in determining the target of retribution (2) there is still a leakage rate in fee collection (3) is maximal quality of service that is limited human resources (HR) in the levy charged.

Keywords: Factors Contibuting to not achievement of target retribution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pendapatan dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Kemudian, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dan desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien dan efektif.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari peneriman pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah adalah jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah yang dapat dipungut dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan meiliki beberapa jenis retribusi daerah. Namun, penulis hanya membahas 5 jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target pada tahun 2009-2013 yang terdiri dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi izin trayek, retribusi sewa alat berat, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Jenis-jenis retribusi daerah tersebut dari tahun 2009-2013 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana retribusi daerah ini banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maka harus diperhatikan setiap tahunnya. Retribusi daerah ini juga harus dipungut dan dikelola secara profesional dan bertanggungjawab karena wewenang pungutan, pengelolaan dan

penggunaan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Abdul (2002: 49) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi daerah adalah target penerimaan belum realistis yang dilihat dari sistem penentuan target yang didasarkan pada historis dan belum dimilikinya data *based* atau data dasar mengenai sumber penerimaan. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan, dikarenakan belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) atau tugas pelaksanaan dilapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak retribusi.

Halim dalam Sri, dkk (2014: 4) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah terjadinya keterbatasan sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan, masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan, dilihat dari belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.

Berikut ini penulis menyediakan 5 jenis retribusi daerah yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mencapai target pada tahun 2009-2013.

Tabel I.1
Jenis-jenis Retribusi Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Yang Tidak Mencapai Target Tahun 2009-2013

No	Jenis-jenis Retribusi	2009			2010			2011			2012			2013		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.289.495.000	855.000.000	37,3	1.770.000.000	1.236.275.000	69,8	2.705.000.000	1.179.120.000	43,5	3.115.000.000	1.983.568.000	63,6	3.781.512.425	1.723.983.000	45,5
2	Retribusi Izin Trayek	1.125.000.000	185.000.000	16,4	1.150.000.000	161.750.000	14	1.200.000.000	267.300.000	22,2	1.240.000.000	205.300.000	16,3	1.400.000.000	370.100.000	26,4
3	Retribusi Sewa Alat Berat	1.248.000.000	131.171.660	10,5	1.218.000.000	120.447.720	9,8	1.218.000.000	121.337.819	9,9	1.500.000.000	258.264.509	17,2	1.218.000.000	366.794.100	30,1
4	Retrubusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.107.065.000	145.730.000	13,1	1.107.065.000	199.490.000	18	1.107.065.000	200.352.000	18,09	1.129.360.000	207.065.000	18,3	1.150.000.000	398.370.000	34,6
5	Retribusi Pengujian Mobil Derek	1.176.650.000	184.000.000	15,6	1.176.650.000	234.340.000	19,9	1.176.650.000	280.700.000	23,8	1.140.000.000	299.800.000	26,2	1.140.000.000	379.856.250	33,3

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat penerimaan target retribusi daerah yang paling menurun dari 5 jenis retribus daerah yang terdiri dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi izin trayek, retribusi sewa alat berat, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan pengujian mobil derek pada tahun 2009-2013 adalah retribusi sewa alat berat dimana persentasi retribusi sewa alat berat pada tahun 2009 adalah 10,5%, tahun 2010 adalah 9,8%, tahun 2011 adalah 9,9%, tahun 2012 adalah 17,2% dan pada tahun 2013 adalah 30,1%.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis**

   Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang berhubungan dengan retribusi daerah pada Provinsi Sumatera Selatan.

2. **Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan**

   Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

3. **Bagi Almamater**

   Diharapkan dapat menjadi bahan refrensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jufrizen (2013) berjudul Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penetapan target penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan kapasitas retribusi parkir, apakah realisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan target penerimaan retribusi parkir dan upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penetapan target penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan kapasitas retribusi parkir, mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan target penerimaan retribusi parkir dan mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Operasionalisasi variabel nya adalah target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kapasitas sebenarnya. Data yang digunakan adalah data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan daerah dari sub sektor retribusi parkir belum optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu

terpenuhi dan target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sri, dkk (2014) berjudul Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada perusahaan daerah pasar Palembang Jaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada perusahaan daerah pasar Palembang Jaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Operasionalisasi variabel nya adalah penerimaan retribusi pasar, pendapatan asli daerah (PAD). Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar disebabkan oleh kurangnya pegawai bagian pengawasan, belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi, dan adanya pungutan liar.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jufrizen (2013) berjudul Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan	Sama-sama membahas mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi.	Perbedaan terletak pada variabel dan tempat. Variabel yaitu target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kapasitas sebenarnya, tempat penelitian dilakukan pada Kota Medan. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti sekarang yaitu faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah dan tempat penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
2	Sri, dkk (2014) berjudul Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya	Sama-sama meneliti tentang Faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi.	Perbedaan terletak pada variabel dan tempat. Variabelnya yaitu penerimaan retribusi pasar, pendapatan asli daerah (PAD), tempat penelitian dilakukan pada perusahaan daerah pasa jaya Palembang, sedangkan variabel yang akan diteliti sekarang adalah faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah dan tempat penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber: Penulis, 2015

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abdul Halim (2007: 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat dari hasil usaha yang ada didaerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kesimpulan dari pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari daerah dan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1) Pajak Daerah
2) Retribusi Daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) Lain-lain pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi:

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2) Jasa giro
3) Pendapatan bunga
4) Keuntungan senilai nilai tukar rupiah terhadap mata uang
5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Marihot (2005: 5) Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah adalah jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

1) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
3) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.

Kesimpulan dari pengertian retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, baik langsung maupun tidak langsung.

b. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan objek retribusi daerah adalah:

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingn dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan subjek retribusi daerah adalah:

1) Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

c. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:

1) Retribusi Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu,
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
e) Retribusi tidakbertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya,
f) Retribusi dapat unggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan potensial, dan
g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi umum adalah:

a) Retribusi pelayanan kesehatan

adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuanagan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil

adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta

perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Dearah.

e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

adalah penyediaan pelayanan parkir tepi jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Retribusi pelayanan pasar

adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

adalah pelayanan pengujian kendaraan termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i) Retribusi penggantian biaya cetak peta

adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta tematik, dan peta teknis (peta struktur).

j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus

adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

k) Retribusi pengelohan limbah cair

adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang

adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Retribusi pelayanan pendidikan

adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Dearah.

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2) Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu,

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, dikecualikan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b) Retribusi pasar grosir dan/pertokoan

adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Dearah.

c) Retribusi tempat pelelangan

adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

d) Retribusi terminal

adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e) Retribusi tempat khusus parkir

adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

adalah Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g) Retribusi rumah potong hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi pelayanan kepelabuhan

Pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan

pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi penyebrangan di atas air

Pelayanan penyebrangan di atas air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Penjualan produk usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jasa perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan keuangan, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan prasarana, atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinian tertentu ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi,
b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan
c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

a) Retribusi izin mendirikan bangunan

   Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB),

koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c) Retribusi izin gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/ gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

d) Retribusi izin trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

d. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Marihot (2005: 7) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah saat ini adalah:

1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Peraturan Daerah (Perda).
2) Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah
3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

e. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan.

f. Cara Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa cara penetapan tarif retribusi, yaitu besarnya retribusi yang harus dibayar terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat jasa dan tarif retribusi yang dihitung berdasarkan:

1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin ditaksir berdasarkan umum.

2) Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tertentu. Besarnya tarif dinyatakan dalam rupiah perunit tingkat penggunaan jasa.

g. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tata cara pemungutan retribusi, yaitu:

1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar dikenakan sanksi retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Target Retribusi Daerah (STRD).
4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

h. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah

Abdul (2002: 49) tentang keuangan daerah pemerintah sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya karena faktor:

1) Target Penerimaan belum realistis, ini bisa dilihat dari:
   a) Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis
   b) Belum dimilikinya data *based* atau data dasar mengenai sumber penerimaan.
2) Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan, ini dikarenakan:
   a) Belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi
   b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.
3) Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau tugas pelaksanaan di lapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak retribusi.

Halim dalam Sri, dkk (2014: 4) tentang keuangan daerah pemerintah, sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya karena faktor:

1) Terjadinya keterbatasan sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan
2) Masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan, dilihat dari:
   (a) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
   (b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009: 53-55), jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada tiga macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau serupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bersifat menjelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

D. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146-147) sumber data penelitian terdiri atas:

1. Data Primer

   Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tapi melalui media perantara.

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang berwenang di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada bagian umum dan bagian akuntansi, yang terdiri dari metode penetapan target retribusi, metode pengawasan target retribusi dan kuantitas sumber daya manusia (SDM).

E. Metode Pengumpulan Data

Riduan (2009: 24) Teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Kuisioner (angket)

   adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dan bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

2. Wawancara

   adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumbernya.

3. Pengamatan

   adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4. Tes

   adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

   adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara dimana wawancara dan dokumentasi dilakukan pada pihak yang berwenang di kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada bagian umum dan bagian akuntansi.

F. Analisis data dan Teknik analisis

Sugiyono (2009: 13-34) analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Analisis Kualitatif

   adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

2. Analisis Kuantitatif

   adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam skala numerik (angka).

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis bentuk uraian yang ada untuk mendapatkan metode penetapan target retribusi menurut teori dan fakta dan metode pengawasan target retribusi menurut teori dan fakta yang dilakukan atau dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan berdiri dari Biro Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Mei 2012. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengelolaan aset atau barang milik daerah merupakan salah satu elemen penting dalam penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah, oleh karena itu penggabungannya dengan tugas pokok dan fungsi keuangan menjadikan beban kerja biro keuangan dan aset daerah semakin berat, sehingga tidak sesuai lagi apabila tetap berada pada struktur organisasi sekretariat daerah yang merupakan unsure staf yang mempunyai fungsi koordinasi. Bahwa guna meningkatkan kualitas penyelengaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keuangan dan aset

daerah maka Biro Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan masih satu lingkup pada Kantor Gubernur Sumatera Selatan yang bertempat di Jl. Kapten A. Rivai Telp. (0711) 317559 Fax (0711) 351972 Palembang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terselengaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar serta terkoordinasinya perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dibidang keuangan daerah.

b. Misi

1) Menyelenggarakan sistem administrasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Melakukan koordinasi perumusan kebijakan perangkat daerah dibidang anggaran, akuntansi dan pelaporan, pembendaharaan, anggaran bawahan dan aset.
3) Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah serta sumber daya aperatur keuangan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

4) Melakukan pengadilan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang keuangan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka menunjang rencana strategis pembangunan daerah Sumatera Selatan maka arah kebijakan umum pengelola keuangan sebagai berikut:

a. Meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya aperatur pengelolaan keuangan daerah.
b. Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Struktur Organisasi

Dengan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan, tentan uraian tugas dan fungsi jabatan structural pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretaris Membawahi:
    1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
    2) Subbagian Keuangan
    3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Bidang Anggaran

1) Subbidang Sosial

2) Subbidang Ekonomi

3) Subbidang sarana dan Prasaran

d. Bidang Perbendaharaan

1) Subbidang Pengelola Kas Daerah

2) Subbidang Belanja Langsung

3) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

e. Bidang Akutansi

1) Subbidang Akuntansi Penerimaan

2) Subbidang AKuntansi Pengeluaran

3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

d. Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset

1) Subbidang Penatausahaan Aset

2) Subbidang Pemeliharaan Aset

e. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

1) Subbidang Pemanfaatan Aset

2) Subbidang Pengamanan Aset

f. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten Kota

1) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah I

2) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah II

3) Subbidang Pembinaan Keuangan WIlayah III

5. Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan

Adapaun Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Selatan yaitu:

a. Kepala Badan

1) Kepala Badan Mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas:

a) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

b) Melaksanakan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

c) Melaksanakan pengujiam atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

d) Menyusun dan menyampaikan laporan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)

e) Mengajukan rencana kebutuhan milik daerah

2) Kepala Badan selaku Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dalam melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Mempunyai tugas:

a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

b) Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

c) Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

d) Menyusun laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Selatan selaku bendahara umum daerah (BUD) mempunyai tugas:

a) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
b) melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
c) menerbitkan surat penyediaan dana (SPD)
d) menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D)
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Selatan selaku Pembantu Pengelola Aset/Barang milik daerah mempunyai tugas:
a) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah
b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang dan melakukan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.
c) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
d) Melakukan pengawasan dan pengendaliaan atas pengelolaan barang milik daerah
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Selatan dalam merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekretaris di bantu oleh:

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    a) mengelola surat masuk dan surat keluar
    b) merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
    c) melaksanakan pemeliharaan barang-barang kantor dan inventaris
    d) menjaga dan memelihara lingkungan kerja kantor
    e) melaksanakan pencatatan dan membuat laporan kepegawaian
    f) membuat daftar unit kepangkatan
    g) merencanakan kebutuhan pendidikan dan latihan terhadap pegawai
    h) mengupayakan kesejahteraan pegawai

2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
   a) meneliti surat perintah pembayaran (SPP) yang di sampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
   b) meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran (SPP)/Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/ Tambah Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS), dan LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
   c) melakukan verifikasi surat perintah pembayaran (SPP)
   d) menyiapkan Surat Perintah membayar (SPM)
   e) melakukan verifikasi surat harian penerimaan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)
   f) melaksanakan akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan menyiapkan laporan keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)
   g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Subbagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
   a) menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)/ rencana kerja anggaran perubahan (RKAP) satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)

b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)
c) menyiapkan laporan kinerja
d) menyusun kebutuhan anggaran kas
e) menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strateis, rencana kerja tahunan
f) mengkoordinasikan implementasikan sistem pengelolaan keuangan dan barang (SIMDA)
g) Mengkoordinir penyusunan program
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknisi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengkoordinasikan dan memverifikasi rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA), menyiapkan data untuk penerbitan surat penyediaan dana (SPD), anggaran kas,

dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Anggaran di Bantu:

1) Subbidang sosial mempunyai tugas:
    a) menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
    b) menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
    c) melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) dan RKAP sebagai bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancanangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
    d) menyiapkan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

e) menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

f) menyiapkan penerbitan surat penyediaan dana (SPD)

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan perumusan petunjuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

b) meghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

c) melaksanakan verifikasi rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP)

d) menyiapkan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

e) menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan

f) menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan penerbitan surat penyediaan dana (SPD)

d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Perbendaharaan di bantu:

1) Subbidang Pengelola Kas Daerah mempunyai tugas:

a) melakukan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah di tunjuk

b) melaksanakan sistem pengeluaran kas daerah

c) melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

d) melaksanakan pengelolaan kas non anggaran

e) menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara *periodic.*

f) menerbitkan keputusan Gubernur tentang pembukaan rekening bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas:

a) melaksnakan registrasi atas surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

b) melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen

c) melaksanakan pencetakan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan daftar pengantar surat perintah pencairan dana (SP2D)

d) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PPK

e) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D)

f) melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

3) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas:
   a) melaksanakan registrasi atas surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
   b) melaksanakan pengendalian atas surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) meneliti dokumen surat perintah membayar (SPM)
   c) menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan daftar pengantar surat perintah pencairan dana (SP2D)
   d) melakukan pemungutan dan pemotongan PPK
   e) melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
   f) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D)
   g) melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

e. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi

pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi di bantu:

1) Subbidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas:
   a) melaksanakan identifikasi dan klarifikasi transaksi penerimaan
   b) melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
   c) menyiapkan laporan penerimaan secara *periodic*
   d) menyiapkan koreksi jurnal
   e) menyiapkan realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahunan
   f) menyiapkan adminstrasi TP-TPTGR
   g) melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah

2) Subbidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas:
   a) melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi pengeluaran

b) melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait
c) menyiapkan laporan pengeluaran secara periodic
d) menyiapkan koreksi jurnal pengeluaran
e) menyiapkan laporan realisasi pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semester
f) menyiapkan laporan realisasi pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahunan.

3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a) menyusun kebijakan akuntansi
b) melakukan rekonsiliasi laporan penerimaan dan pengeluaran dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
c) menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semester dam prognosis 6 bulan berikutnya
d) menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahunan
e) menyiapkan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
f) menyiapkan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD)

g) menyiapkan rancangan perda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

h) menyajikan system informasi keuangan daerah pemerintah provinsi sumatera selatan

i) melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD)

f. Bidang Penatusahaan dan Pemeliharaan Aset

Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan pemeliharaan asset daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset di bantu:

1) Subbidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang penatausahaan asset

b) Melaksanakan pengendalian terhadap mutasi barang/asset satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja lainnya

c) Menghimpun, meneliti dan menyusun bahan dalam rangka kebutuhan barang unti (RKBU)

d) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi serta pengendalian asset daerah.

2) Subbidang Pemeliharaan Aset mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidaang pemeliharaan asset

b) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan asset

c) melaksanakan proses administrasi pemeliharaan asset

d) menghimpun dan mengkordinasikan rencana kebutuhan pemeliharaan asset daerah

g. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan asset.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset di bantu:

1) Subbidang Pemanfaatan Aset mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pemanfaatan asset

b) melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan asset

c) menyiapkan bahan adminstrasi penggunaan penghapusan dan perubahan status hokum asset daerah
d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait dalam pemanfaatan asset
e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan asset daerah.

2) Subbidng Pengamanan Aset mempunyai tugas:
a) bahan, perumussan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan asset
b) melaksanakan pengawasan dan pengamanan asset
c) mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pengamanan asset
d) melaksanakan pembinaan pada unit kerja terkait terhadap asset-aset milik pemerintah provinsi
e) melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

i. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dan memberikan pembinaan terkait dengan pemanfaatan penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota di bantu:

1) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah I meliputi:

   Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

2) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah II meliputi:

   Kota Lubuk Linggau, kabupaten Musi rawas, kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam

3) Subbidang pembinaan Keuangan Wilayah III Meliputi:

   Kabupaten Oga Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komreing Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih

   Masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut:

   a) menyiapkan rancangan perda kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi

   b) Menyiapkan bahan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD), perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

c) Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota
d) Menyiapkan bahan bimbingan teknis
e) Menyiapkan bahan pengelolaan data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
f) Menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan secara berkala hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
g) Menyampaikan bahan laporan hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Bupati/Walikota
h) Melakukan pembinaan fasilitasi pengelolaan dana transfer kepada pemerintah kabupaten/kota
i) Mengolah dan melakukan konversi data keuangan daerah
j) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Data Personalia

Dari segi personalia kepegawaian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi kuota struktur organisasi yang dapat terlihat jelas dari penjelasan dibawah ini prihal mengenai data personalia jumlah kepegawaian, jumlah dari data pimpinan pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat dalam struktur organisasi ebagai berikut:

Jumlah pegawai	: 108 orang
Cpns	: 1 orang
Honorer	: 44 orang
Tingkat Pendidikan	
- S2	: 18 orang
- S1	: 70 orang
- D4	: 2 orang
- D3	: 6 orang
- SMA	: 8 orang
- STM	: 1 orang
- SMEA	: 1 orang
- SLTP	: 3 orang
- SD	: 0 orang
Jenis Kepegawaian	
- PNS	: 108 orang
- CPNS	: 1 orang

- Pegawai Harian/Kontrak : 38 orang

Jenis Kelamin

- Pria : 44 orang
- Perempuan : 65 orang

Pangkat/ Gol

- Gol IV : 8 orang
- Gol III : 94 orang
- Gol II : 7 orang

7. Struktur Organisasi BPKAD

Struktur Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan perssonil yang memegang jabatan tertentu di mana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatanya. Hubungan kerja dalam organisasi di tuangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang - orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antara bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan system hubungan dalam

organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertical maupun horizontal. Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang di inginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

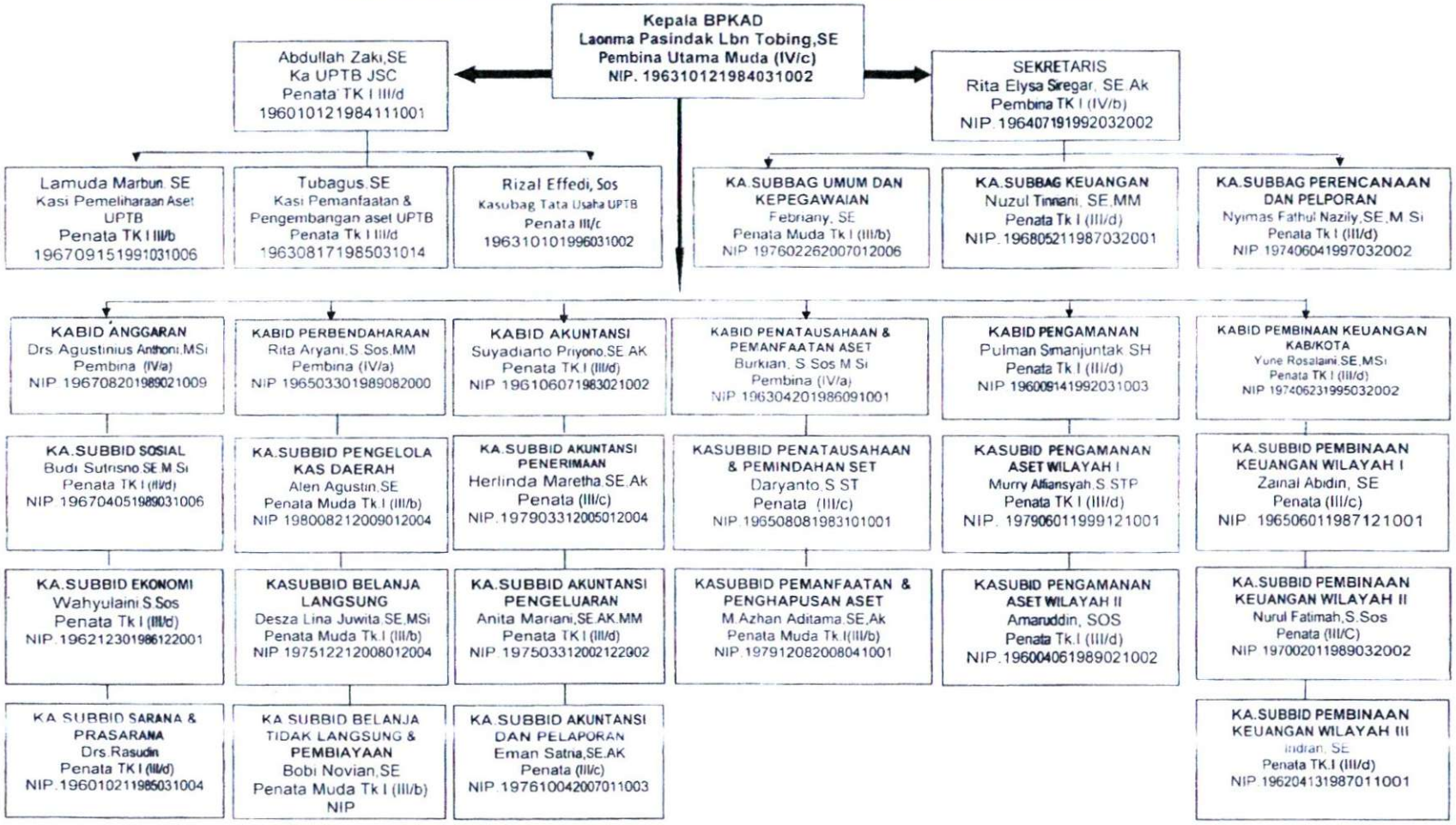

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Target penerimaan belum realistis, ini dilihat dari:

   a) Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis

      Penetapan target retribusi tempat rekreasi dan olahraga seperti pada hutan taman wisata punti kayu di Palembang. Berdasarkan hasil wawancara penetapan target retribusi yaitu menggunakan cara *increamentalism* yang berarti menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

      Penetapan target retribusi daerah juga harus berdasarkan potensi yang ada. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Penetapan target retribusi juga dihitung berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga Pada tabel IV.2 dapat dilihat jumlah pengunjung setiap bulannya pada tahun 2011-2013

Tabel IV.2
Jumlah Pengunjung Hutan Taman Wisata Punti Kayu
2011-2013 (dalam jiwa)

No	Bulan	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Januari	6.244	3.796	3.848
2	Februari	2.569	3.318	2.696
3	Maret	4.437	3.178	2.708
4	April	4.374	3.339	1.894
5	Mei	3.974	2.936	2.352
6	Juni	5.029	4.131	2.682
7	Juli	3.769	3.138	2.546
8	Agustus	4.639	5.346	4.043
9	September	3.495	3.978	3.650
10	Oktober	2.806	2.833	1.720
11	November	3.464	4.138	2.050
12	Desember	3.470	3.453	2.116
Total		48.270	43.584	32.296

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Hutan Taman Wisata Punti Kayu memiliki potensi yang sangat banyak yaitu antara lain memiliki hutan pinus, satwa liar, taman bunga, taman bermain, kantin/ pondok, toilet umum. Namun, ada beberapa potensi pada taman wisata punti kayu yang kurang cukup memadai seperti, kandang satwa yang tidak terawat dan kotor, toilet yang bau dan kumuh, satwa yang berada disana juga sedikit. Sehingga, pengujung kurang tertarik untuk mengunjunginya karena berdasarkan pertananyaan kepada pengunjung di punti kayu, biasanya

setiap libur mereka sekeluarga berlibur di sana, namun akibat kurang terawatnya potensi yang ada pada taman wisata punti kayu itu sehingga mereka hanya sesekali saja mengunjunginya.

Penetapan target retribusi izin trayek berdasarkan hasil wawancara yaitu berdasarkan *increamentalism* yang di mana menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

Penetapan retribusi daerah juga harus berdasarkan potensi yang dimiliki. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, penetapan target retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis dan frekwensi penerbitan izin, sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek. Jumlah kendaraan di Palembang dapat dilihat di tabel IV.3 berikut ini:

TABEL IV.3
JUMLAH KENDARAAN UMUM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 (dalam unit)

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kendaraan	
		Mobil Penumpang	Bus sedang/ Bus kota
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	701	467
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	998	506
3	Kabupaten Muara Enim	635	341
4	Kabupaten Lahat	726	498
5	Kabupaten Musi Rawas	714	367
6	Kabupaten Musi Banyuasin	719	320
7	Kabupaten Oku Timur	894	418
8	Kabupaten Oku Selatan	985	443
9	Kabupaten Ogan Ilir	809	304
10	Kabupaten Banyuasin	880	354
11	Kota Palembang	1.927	1.068
12	Kota Pagar Alam	1.063	808
13	Kota Lubuk Linggau	1.116	989
14	Kota Prabumulih	1.255	963
15	Kabupaten Empat Lawang	814	430
Jumlah		14.236	8.276

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukaan pendataan terhadap kendaraan yang tidak mempunyai izin trayek karena banyak angkutan kota/ bus kota yang sudah terjual sehingga menyulitkan pihak Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pendataan. Namun,

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sedang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia agar dapat melakukan pendataan terhadap kendaraan umum yang tidak memiliki izin trayek.

Penetapan target retribusi sewa alat berat berdasarkan hasil wawancara yaitu menggunakan *increamentalism* yang di mana menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, penetapan target retribusi sewa alat berat diukur berdasarkan keadaan dan jangka waktu pemakaian alat berat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, alat berat yang dimiliki Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan saat ini hanya terdiri dari 38 unit dengan kondisi 23 baik, 6 kurang baik, dan 10 unit rusak berat. Dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini:

Tabel IV.4
Data Inventaris Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014

No	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan (B/KB/RB)
1	Motor Grader	Mitshubishi/MG230	1996	B
2	Motor Grader	Komatsu/LAD511 API	1999	RB
3	Exvacator On Track	Hitachi/ EX 100	1991	B
4	Dump Truck Rear	Isuzu/ NKR 58 E2	1991	B
5	Dump Truck Rear	Mitsubishi/FE-349	1996	RB
6	Dump Truck Rear	Mitsubishi/FE-349	1999	RB
7	Dump Truck Rear	Toyota/ Dyna Long	1999	B
8	Dump Truck	Toyota/ Dyna Long	2008	RB
9	Dump Truck	Toyota/ Dyna Long	2008	B
10	Dump Truck	Isuzu	2008	B
11	Dump Truck	Isuzu	2008	B
12	Dump Truck	Mitsubishi	2008	B
13	Dump Truck	Mitsubishi	2008	B
14	Dump Truck	Barata/ MG 6	1994	KB
15	Macadam Roller	Barata/ MG 8	1994	RB
16	Macadam Roller	Bukaka/ BRR-8TW	1980	KB
17	Macadam Roller	Barata / MGB-1	1980	B
18	Tandem Roller	Barata/ MGB-2	1982	RB
19	Tandem Roller	Barata/ MGD-1000	1988	B

20	Tandem Roller	Dynapac/ CB 16 CLL	1988	B
21	Tandem Roller	Meiwa MG 7	1999	KB
22	Tandem Roller	SAKAI	1980	B
23	Pneumatic Tire	Meiho	1999	B
24	Stamper	Sakai/ PC 500 B	1991	RB
25	Vibration Plate	Sakai/ PC 500 B	1991	RB
26	Vibration Plate	Armindo	1993	RB
27	Concrete Mixer	TCM/ 815-2	1991	B
28	Loader On Wheel	Samsung/ SL-120 rb	1986	KB
29	Loader On Wheel	Mitsubishi	1999	B
30	Loader On Wheel	Mitsubishi	1988	B
31	Truck Crane Other	Toyota/ BY-42	1988	RB
32	Electric Generating	Rugerini/ RD-200	1995	B
33	Electric Generating	Ratna/ ST3H	1997	B
34	Electric Generating	Marely/ MT7B-160/RA-457	1998	B
35	Electric Generating	Toyota Rino/ BY-42	1988	B
36	Pick Up	Chevrolet Luv/ MTV-750	1991	KB
37	Pick Up	Toyota	1995	B
38	Mobil Tangki	Isuzu	2008	B

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki alat-alat berat yang cukup, namun kurang memadainya kualitas dan umur alat berat yang telah lama mengakibatkan alat berat tidak bisa dipakai atau dioperasikan.

Penetapan target retribusi pengujian kendaraan bermotor daerah berdasarkan wawancara dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu berdasarkan *increamentalism* yang di mana menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

Penetapan target retribusi juga harus berdasarkan potensi yang dimiliki. Peraturan Daerah No.3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, penetapan target retribusi diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan yang diberikan. Dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor pada tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011-2014 (dalam unit)

No	Tahun	Total
1	2011	2.013.404
2	2012	2.532.721
3	2013	2.864.717
4	2014	3.106.088
JUMLAH		**10.516.930**

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Tabel IV.6
Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor dan Jenis-jenis Alat Uji
Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penguji				Jenis Alat			Merk Alat	Tahun Pembelian
		1	2	3	4	NMk	Mk	Kel		
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	-	1	2	-	-	1	-	Space	2005
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2	-	1	-	3	5	-	Hpa	2004
3	Kabupaten Muara Enim	1	1	3	1	16	13	1	Space	2004
4	Kabupaten Lahat	2	1	1	2	5	11	-	GTX-GEC	2001
5	Kabupaten Musi Rawas	1	1	-	1	3	-	3	Hpa	2002
6	Kabupaten Musi Banyuasin	2	1	-	1	2	6	-	Hpa	2002
7	Kabupaten Oku Timur	-	1	-	1	1	-	-	Chang' an	2000
8	Kabupaten Oku Selatan	1	1	1	1	4	9	3	Cartex	2002
9	Kabupaten Ogan Ilir	1	-	1	-	2	6	2	Hpa	2003
10	Kabupaten Banyuasin	2	3	-	-	2	6	-	Banzai	2003
11	Kota Palembang	1	1	4	2	10	18	-	Space	2004
12	Kota Pagar Alam	-	1	1	-	2	6	-	Space	2004
13	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	1	6	12	-	Chang' An	2005
14	Kota Prabumulih	1	4	-	-	1	-	-	Cartex	2002
15	Kabupaten Empat Lawang	-	1	-	-	-	8	-	Space	2001

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Keterangan :

1 : Jabatan Fungsional Pemula

2 : Jabatan Fungsional Pelaksana

3 : Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan

4 : Jabatan Fungsional Penyelia

NMK : Non Mekanis

Mk : Mekanis

Kel : Keliling

Berdasarkan tabel IV.5 kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dapat dilihat pada tabel IV.6, pihaknya mengalami kesulitan dalam pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya jumlah penguji yang ditugaskan, hal ini di tegaskan karena tidak ada keseimbangan antara jumlah kendaraan yang harus diuji dengan jumlah pengujinya. Mereka juga mengalami beberapa hambatan yaitu yang berasal dari pihak penumpang, nampaknya belum sadar benar memahami makna dari undang-undang mengenai keselamatan perlindungan penumpang, sehingga setiap ada sengketa dengan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, penumpang menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa.

Penetapan target retribusi pengujian mobil derek berdasarkan wawancara dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu berdasarkan *increamentalism* yang di mana menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

Penetapan target retribusi juga harus berdasarkan potensi yang dimiliki. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, penetapan target retribusi pengujian mobil derek dihitung berdasarkan jumlah dan jangka waktu pemakaian mobil derek. Mobil derek yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan saat ini baru 14 unit mobil derek.

Menurut wawancara dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan idealnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi harus memiliki 50 unit mobil derek jadi masih kurang 36 mobil derek lagi. Saat ini jumlah kendaraan semakin lama semakin bertambah dan semakin banyak pula parkir liar, namun terbatasnya mobil derek menyebabkan terbatasnya juga dalam menderek kendaraan yang parkir liar di jalan.

b) Belum dimilikinya data *based* atau data dasar mengenai sumber penerimaan.

Data *based* atau data dasar merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing dinas belum memiliki data *based* atau data dasar mengenai sumber penerimaan secara akurat dan gambaran menyeluruh mengenai data-data potensi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi izin trayek, retribusi sewa alat berat, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pengujian mobil derek. Jika data-data mengenai retribusi tersebut telah terdata secara baik di data *based* dengan mudah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tersebut dapat mengetahui berapa besar potensi yang dimiliki dan potensi yang dapat digali atau dikembangkan serta dikelola dari setiap retribusi-retribusi yang dimiliki.

mobil derek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu kurang nya jumlah mobil derek yang tersedia sehingga menyulitkan pekerjaan di lapangan.

3. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau tugas pelaksana di lapangan.

Kualitas pelayanan sangat penting agar penerimaan retribusi dapat mencapai target. Salah satu palayanan yang baik adalah Sumber daya manusia (SDM), yang di mana sumber daya manusia (SDM) mempunyai peran yang penting dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah. Sumber daya manusia (SDM) di sini yaitu aparat pemungut retribusi daerah yang berada di lapangan. Aparat pemungut retribusi hendaknya memiliki kemampuan atau pengetahuan yang mendalam mengenai permasalahan tugas yang mereka ambil yaitu dalam hal pemungutan retribusi daerah, sehingga dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparat pemungut retribusi akan dapat melaksanakan tugas yang mereka ambil dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara pada dinas-dinas yang bersangkutan, aparat retribusi yang disediakan disetiap dinas tidak mencukupi untuk pemungutan retribusi di lapangan, terbatasnya pemungut retribusi dilapangan mengakibatkan kesulitan dalam hal pemungutan. Aparat retribusi yang disediakan oleh masing-masing

retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Wajib retribusi yang tidak membayar dikarenakan sarana dan prasarana yang ada masih kurang dan belum cukup memadai. Misalnya, pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu pada hutan taman wisata punti kayu di mana kandang satwa yang tidak terawat dan kotor, toilet yang bau dan kumuh, satwa yang ada sedikit. Pada retribusi izin trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu kurangnya pendataan tehadap kendaraan yang tidak mempunyai izin trayek. Pada retribusi sewa alat berat yaitu alat berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan kebanyakan sudah lama dan ada yang sudah tidak layak pakai. Pada retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu kurangnya petugas penguji dan kurangnya alat-alat pengujian untuk kendaraan bermotor. Pada retribusi pengujian

dinas hanya sekitar 5-11 orang. Dapat dilihat jumlah petugas operasional di lapangan pada tabel IV berikut ini:

Tabel IV.7
Daftar nama Petugas Operasional di Lapangan pada Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan Kominfo dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Daftar Dinas dan Petugas Operasional di Lapangan		
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Sumsel	Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Prov.Sumsel	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1. Muchtar Widharsa 2. Norman Agung, S.E 3. Didi Wahyudi 4. M. Herijar 5. Makruf, S.Sos 6. Harry Zasman 7. Pelyadi 8. Edi Pairaman	1. M. Nursal Dekamora 2. Amrullah, S.Sos 3. Agung Fitrianto 4. Abdul Kohar 5. Nurman Agung 6. Very Sinovi 7. Dedy Afrizal, S.Sos 8. Amir Faisal	1. Syarifuddin Anwar, S.Hut 2. M. Yandi 3. Suhendri, S.Hut 4. Sudiono 5. Joko Pornomo 6. Sumarno 7. Iwan Juanda
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1. Ahmad Lani 2. Suryadi 3. A. Haris Munandar 4. Hartini, S.Sos 5. Nadjamudin 6. Ahmad Firly, S.Sos 7. M. Nur Kolun	1. Nasran, S.Sos 2. Heru Susanto 3. Abdullah Fairino 4. M. Nuh Ismail 5. Hermansyah 6. Maruan, S.Sos 7. Andika Fatra 8. Saidi Bolam	1. Sugiyanto, A.Md 2. Heru Supriyanto 3. Sujoko 4. Agus Darmawan, A.Md 5. Eko Susanto, S.Hut 6. Slamet Riadin 7. Viktor Sitohang 8. Yuliadi
3	Kabupaten Muara Enim	1. Mukhlisin 2. Ahmad Rusdi 3. Yudi Irawan, S.E 4. M. Rizal 5. Sujono 6. Heri Subagio 7. H. Suwarno 8. Zainal Harly, S.Kom	1. Purwodarminto 2. M. Zen Rebu 3. Rohman Tamim 4. Sumanto 5. Tabroni 6. Ichsanudin, S.Sos 7. Giyana, S.Sos	1. Abd. Kadir 2. Agoes Hadi Tjahyono, SP 3. Mukiyat, SP 4. Agus Setiawan, A.Md 5. Soewarno, S.Hut 6. Djudjur Sumito Putra 7. Supri, SP
4	Kabupaten Lahat	1. Herman Afrizal, S.E 2. Toro Purnomo 3. H. Sarindo Lubis 4. M. Yunus AR 5. Yudi Awaludin 6. Achmadi 7. H.M Nasir	1. Imam Bajuri 2. Kusnantoro 3. Yohanes Tri Wijarnako 4. Puji Hartono, S.Sos 5. Sutarja 6. Tumbuk Punadi 7. Bambang Sumedi, S.E 8. Agus Listanto	1. Tolak IS, SP 2. Bambang Setiawan, S.Hut 3. Munawi, SP 4. Sudarto 5. Sedono, A.Md 6. Djasuli, A.Md 7. Abdul Latif 8. Timpal Ady Susilo, SP

5	Kabupaten Musi Rawas	1. Herman Arena 2. Syakur S.H 3. M.Haikal Harits, S.E 4. Abdul Rahim, S.Kom 5. Jamaluddin 6. Irwan Sugiarto 7. Bayu Purnomo 8. Sariyanto, S.T	1. Totok Sugiarto 2. R. Budi Bawoko 3. Nur Achmad 4. Joko Untung 5. Margi Sudarmoto 6. Arifin Widiarto, ST 7. Widiatmo Ariwibowo 8. Riyanto Putro, S.Sos 9. Zainudin Moch Nur, S.T	1. Joko Suyono, S.Hut 2. Azis, S.Hut 3. Agus Santoso, SP 4. Supriyadi 5. Surata, A.Md 6. Mudjihadi Rahardjo 7. Trisnoyanto
6	Kabupaten Musi Banyuasin	1. Andy Rulli, A.Md 2. Saharuddin, A.Md 3. Wagiman, S.E 4. M. Alimuddin 5. Andi Komaru 6. Hasan Basri 7. Musakkar Mulyadi 8. Bangkit Setiawan 9.Reza Fahlevi	1. Mugiman 2. Himan Jaya 3. Wahyu Estijanto, S.E 4. Nur Salim, A.Md 5. Wahyu widodo 6.. Eka Suryo Prihantoro 7. Gandung Suwarta, S.IP 8. Yusak Hendrawan, S.E 9. Budi Santoso 10. Aris Bintoro	1. Ahmad Rasidi, SP 2. Sarnyoto 3. Amirul Fattah, S.Hut 4. Moch. Yusuf 5. Imam Rosidi, S.Hut 6. M. Khosis Haryanto 7. Kuspriadi 8. Suwardjo
7	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1. Julizar Rahman, S.Sos 2. Habibi Ibrahim, S.E 3. Budi Lukito, S.Sos 4. Muhammad Zikri 5. Asnal Armedi 6. R. Wiendra 7. Dedi Sadika 8. Ariantono Hedi	1. Wimbo Budi Prasojo 2. Dedi Dwi Cahyo 3. Nurhidayat, S.T 4. Bambang Isjuniarto 5. Sumardiyono, S.Kom 6. Nurhidayanto Prasetyo 7. Sumadi, S.Sos 8. Hari Winarsa, S.Kom 9. Wahyudi Herimawan	1. Anang Irianto 2. Martanto Budi Santoso 3. Wijianto, S.Hut 4. Puji Setiono 5. Mashadi Surrahman 6. Nugrahadi, A.Md 7. Karram 8. Robbi Firtanto, S.Hut
8	Kabupaten Ogan Komeing Ulu Timur	1. M. Utrizal, S.Kom 2. Yendi Gemilang 3. Apriana Kurniawan 4. Azwar Aswadi S,Sos 5. Presno Akandri 6. Rusli, S.T 7. Luki Prima	1. Hamra Usman, S.E 2. Syafruddin Suhupa 3. Muhammad Thahir 4. Derhana Abdullah 5. Muchlis Mustapa, S.Sos 6. Faizin Baharuddin 7. Syahra Abdulwali 8. Abdul Rozak	1. Sukardjo, S.P 2. Mohammad Edi, S.P 3. Syahrim, S.Hut 4. Soedarsono, S.Hut 5. Matiyus Batari 6. Imam Surjono 7. Imam Suparjo
9	Kabupaten Ogan Ilir	1. Taufik Gunawan 2. Hendri Suhendri, 3. Yayat Kurniawan, S.Kom 4. Indra Supriyadi 5. Dedi Wizani 6. Asrian Nooe, S.Kom 7. Arold Prahudi, S.E 8. Ichsanul Hakim	1. M. Teguh Abdullah 2. Ahmad Sibay S.Sos 3. Ashar Yabie 4. Henrik Hali 5. Mahmud, S.E 6. Moh. Yusuf Sanusi 7. Moh tamrin Sahbe 8. Mahmud Mala 9. Hanityo Soelistoabdi	1. Irwan Gatot Prakoso 2. Arby Pratama, S.Hut 3. Alfalah Sobri 4. Wirardi Hartoyo, A.Md 5. Candra Hermansyah 6. Eri Bahtera, S.Hut 7. Mahmal Nugraha 8. Fadli Rahman Wahidi
10	Kota Palembang	1. Aditya Ramdani 2. Ari Julhari, S.T 3. Ade Oktariansyah 4. M. Prabowo 5. Sukisno Slamet, S.E 6. M. Akil Sauki, S.T 7. Berlian Tatagumi 8. Warsilan 9. Agung Nugroho	1. Nando Ilham, S.Sos 2. Renaldi Alfazri, S.E 3. Rio Saputra 4. Zainal Ilmi, S.Sos 5. Yunus Wardhani 6. Andi Sugianto 7. Khaidir Ismet 8. Dedi Herdian 9. Deni Renaldi 10. Syamsu Djohan, S.Sos	1. Hariadi Eko Saputra 2. Saktiadi, S.P 3. Agung Wahyu Rianto 4. Muhammadi Dimas 5. Firdaus Akbar, S.Hut 6. Ibnu Kasir, S.Hut 7. Tri Kasogi, S.Hut 8. Bahrul Arkani 9. Rusliansyah

11	Kota Prabumulih	1. Yazid Setiawan 2. Jalil Indrawan 3. Amri Nazir 4. Eka Puradinata, S.E 5. Lucky Zaiman 6. Epi Hendra, S.Sos 7. Zainal Katan, S.T 8. Tatang Suhendra 9. Edwar Muhammad	1. Effendi Salim 2. Baharuddin Tanriwali 3. Joko Martono, S.Sos 4. Andi Syahrul 5. Bambang Ristanto 6. Anton Pasha, S.Kom 7. Abu Bakar Alhamdali 8. Yan Mandianov, S.Sos 9. Untung Siswanto	1. Darma Indrawan, A.Md 2. Rizal Fahlevi 3. Mustofa Lutfi, A.Md 4. Aji Sofyan Effendi 5. Abdul Gafur, S.Hut 6. Muhammad Yasir Arafat 7. Ibnu Abdi Lahaya, S.P 8. Muhammad Subhan
12	Kota Pagar Alam	1. Miswanto, S.Sos 2. R. Imran Hanafi 3. Said Muhammad 4. Catur Hariayuda 5. Edi Mulyanto 6. Faisal Fahlevi, A.Md 7. Wan Darmais 8. Fery Santana, S.E 9. Abdul Hadi	1. Abdul Wahid 2. Didi Santoso 3. Hadi Rahmad, A.Md 4. Karya Hermawan 5. M. Nurdin 6. Aris Sulistia 7. Muhammad Fadlan 8. Andrean Salman, S.Sos 9. Juliadi Halamoan 10. Rusdi Mochtar 11. Frengky Azrianto	1. Dimas Kurdiman, S.Hut 2. Budi Santoso, S.Hut 3. Robi Firli, A.Md 4. Ismail Marzuki 5. Darmawan, S.Hut 6. Muliadi 7. Pamasang Siburian 8. Rais Abdullah 9. Hendra Agustriawan
13	Kota Lubuk Linggau	1. Syafriman 2. Imam Bayhaki 3. Faisal Husni, S.T 4. Ahmad Zacky 5. Haris Hartono 6. Hendra Kamaludin 7. Husni Ahmad, S.T 8. Juni Rianto	1. Mohammad Irzan 2. Edy Normansyah 3. Gunawan Feriyanto 4. Djoko Muljono, S.E 5. Nurwianto 6. Bayu Wicaksono 7. Supriyanto 8.Muhammad Qodri, S.Sos 9. Andi Hermawan	1. Abdul Hamid, S.Hut 2. Fachri Sefriansyah 3. Hendro Baskoro 4. Malik Ibrahim, S.Hut 5. Amrullah Alhadi, A.Md 6. Ari Muzari 7. Dwi Hadi, A.Md 8. Indat Nasihin
14	Kota Banyuasin	1. Ismu Hariadi 2. Arief Saifudin 3. Mursalim, S.E 4. Abdul Halim 5. Joko Arifin, A.Md 6. Gilang Ramadhan 7. Abdurachman Genta 8. Rama Satria, S.T 9. Juanda	1. Syamsu Udaya 2. Ali Hanafiah 3. Ariansyah Putra, S.Kom 4. Rodi Antoni 5. Evan Pramesti 6. Abdul Ghoni, S.Sos 7. Selamet Raharjo 8. Doni Rakasiwi 9. Irawan Saputra	1. Moch. Toha, S.Hut 2. Edwar Jauhari, SP 3. Azwar Halim, A.Md 4. Restu Belaputra, A.Md 5. Aditya Putra, SP 6. Tarmizi 7. Dedi Nurmansyah 8. Yasrul
15	Kabupaten Empat Lawang	1. Rahman Milyani 2. P. Sulfarino, S.E 3.Yahya Ishak 4. Kanaris 5. Ahmad Husin 6. Jemi Rozali, S.Sos 7. Makin MY	1. Zaki Zainal 2. Firdaus 3. M. Noer Heryanto 4. Artfiandi 5. Ahmad Royhan, S.Sos 6. Andi Anggara 7. Andi Syafik 8. Dendi Siregar, S.Sos	1. Prasdipto Arief, S.Hut 2. Nasrun Baklani 3. Munawir Ahmad 4. Ghiffari Abdi, S.Hut 5. Parista Pratama 6. Febrian Dio Utama, A.Md 7. Wijaya

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan .Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2015

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah

1. Target penerimaan belum realistis

   Target penerimaan retribusi daerah belum realistis, karena tidak berdasarkan penelitian yang teliti dan tidak berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Daerah sebaiknya untuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga dihitung berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis dan frekwensi penerbitan izin, sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek, retribusi sewa alat berat diukur berdasarkan keadaan dan jangka waktu pemakaian alat berat, retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan yang diberikan dan retribusi pengujian mobil derek dihitung berdasarkan jumlah dan jangka waktu pemakaian mobil derek.

2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan

   Kebocoran atau kelolosan terjadi, karena setiap setoran hasil pemungutan retribusi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan kurangnya pengawasan dalam hal pemungutan retribusi di lapangan. Kurangnya pemberlakuan sanksi dari dinas-dinas yang bersangkutan dan kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.

3. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksanaan dari kantor

   Tingkat pelayanan belum maksimal, karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lapangan yaitu kurangnya aparat pemungut retribusi yang ditugaskan dari kantor.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan, maka saran yang penulis dapat berikan untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target retsibusi daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

1. Memperhatikan perencanaan penyusunan target retribusi daerah, melakukan pendataan ulang jumlah objek retribusi, meninjau kembali tarif retribusi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi retribusi dan memberitahukan bahwa retribusi daerah adalah salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan

daerah, dan merupakan salah satu sumber yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Meningkatkan pengawasan dan pengetatan dalam pemungutan retribusi di lapangan agar terhidar dari kebocoran atau kelolosan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu serta memperbaiki sarana dan prasarana untuk setiap retribusi.

3. Merekrut sumber daya manusia (SDM) yang baru dan yang berkomopeten mengenai retribusi daerah, agar pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat. Jakarta.

Jufrizen. 2012. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis,* (online), Vol. 13, No. 1 April, Hal 30-47, (http://jurnal.umsu.ac.id), diakses 30 Maret 2015.

Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah.* PT. Raja Grapindo Persada. Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Kedua, BPFE. Yogyakarta.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Riduan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel Penelitian.* CV Alfabeta. Bandung

Sri Sundari, Lili Syafitri dan Raisa Pratiwi. 2014. Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Hal 1-12, (http://ejournal.mdp.ac.id) diakses 28 Maret 2015.

Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian.* Cetak Keempat Belas, Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A.Rivai Tlp (0711) 317559 Fax (0711) 351972 Palembang 30129

r : 900/ 0783 /BPKAD-I/2014
: Biasa
iran : -
: Mohon Bantuan Data

Palembang, 31 Oktober 2014

Kepada
Yth. Ketua Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
di
Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 218/G-17/FEB-UMP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal pada pokok surat, permohonan Saudara dapat disetujui dan lebih lanjut agar menghubungi Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mahasiswa yang akan melaksanakan Riset adalah :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Dia Rachma Yanti	22 2011 210	Akuntansi
2.	Isma Pibriani	22 2011 184	Akuntansi
3.	Indah Wahyuni	22 2011 209	Akuntansi
4.	Febilia Yolanda	22 2011 218	Akuntansi
5.	Shela Dewi Payona	22 2011 231	Akuntansi

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

an. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Prov. Sumsel
Sekretaris,

Rita Elysa Siregar, SE.Ak
Pembina Tingkat I
196407191992032002

busan Yth :
etaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal Penelitian

Keterangan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survey Pendahuluan																								
Laporan Survey pendahuluan																								
Proposal																								
Seminar Proposal																								
Revisi seminar																								
Pengambilan data penelitian																								
Pengelolaan data analisis																								
Hasil penelitian																								
Penggandaan penelitian																								
Ujian komperehensif																								
Perbaikan skripsi																								

Sumber: penulis, 2015

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

179/J-1O/FEB-UMP/SHA/III/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**SHELA DEWI PAYONA**
NIM	:	**222011231**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 27 Maret 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LABORATORIUM BAHASA
Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Shela Dewi Payona
Place/Date of Birth	:	Riau, September 11th, 1993
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	February 17th, 2015
		Scaled Score
Listening Comprehension	:	53
Structure Grammar	:	43
Reading Comprehension	:	49
OVERALL SCORE	:	483

Palembang, March 5th, 2015
Head of language Laboratory

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

125certificates

BIODATA DIRI

Nama	: Shela Dewi Payona
Nim	: 22 2011 231
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Riau, 11 September 1993
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. D.I Panjaitan Lr. Civo No. 177 Plaju
No. Hp	: 082180005603
Nama Ayah	: Lukman Ratu
Nama Ibu	: Syafnida
Alamat Orang Tua	: Jl. D.I Panjaitan Lr. Civo No. 177 Plaju

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1999-2005 : SD Negeri 368 Palembang
2. 2005-2008 : SMP Negeri 16 Palembang
3. 2008-2011 : SMA Negeri 8 Palembang
4. 2011-2015 : Universitas Muhammadiyah Palembang

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

IA MAHASISWA :	Shela Dewi Payona	PEMBIMBING	
:	22 2011 231	KETUA	H.M. Basyaruddin R, S.E, Ak., M.Si, CA
GRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	

UL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
9/2-2015	Bab I - V.	A		Perbaiki Sesuai
				Koreksi.
17/2-2015	Bab I - V	[illegible]		Pembahasan di
				perjelas
24/2-2015	Bab I - V	[illegible]		Perbaiki Sampai
26/2-2015	Bab I - V			Perbaiki, Sampai
				Abstrak
4/3-2015	Penulis [illegible]			Perbaiki Pembahasan
				dengan menggunakan Tiwit
				Data.
5/3-2015	Bab I - V			Sve Siapkan
				Slide dalam P Bab

TATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	(B)

palembang.net/feump Email : feumplg@gmail.com

at : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Tanggal : Senin, 23 Maret 2015

u : 13.00 s/d 17.00 WIB

: Shela Dewi Payona

: 222011231

am Studi : Akuntansi

Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
	H.M. Basyaruddin R, S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	8/4-2015	
	H.M. Basyaruddin R, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	8/4-2015	
	Betri, S.E, M.Si, Ak., CA	Penguji I	8 April 2015	
	Welly, S.E, M.Si	Penguji II	8 APRIL 2015	

Palembang, April 2015
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961